



BAB I
PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang sangat memperhatikan pemeluknya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah SWT (Khasanah, 2021). Selain itu menuntut ilmu adalah perintah yang harus dijalankan oleh umat islam. Dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1, yaitu :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan* (Al-Alaq [96] : 1).

Menurut Quraish Shihab, bahwasanya kata iqra' di ayat tersebut berasal dari suku kata qara'a yang dapat melahirkan aneka makna seperti menyampaikan, meneliti, mengalisis, mengetahui ciri-ciri sesuatu bahkan membaca baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis (H. Mansyur, 2023). Untuk menjalankan kewajiban tersebut dibutuhkan sebuah lembaga yang menaungi proses pembelajaran keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan yang sudah biasa dikenal oleh kalangan masyarakat disebut pondok pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa (Syafe'i, 2017).

Melihat fenomena kewajiban untuk menuntut ilmu bagi semua kalangan, membuahakan masalah untuk beberapa kalangan khususnya penyandang disabilitas tunarungu. Disabilitas rungu atau tuli merupakan keterbatasan fisik seseorang untuk mendengar (Pratiwi & Mangunsong, 2018). Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran. Akibatnya individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara (Rahmah, 2018). Tunarungu merupakan ketidakmampuan mendengar dari tingkat keparahan ringan hingga berat dengan dua klasifikasi yakni ketulian (*deafness*) dan kurang dengar (*hard of hearing*) (Hallahan et al., 2007). Melihat kekurangan tersebut, tentu sistem

pendidikan untuk orang tuli berbeda dengan orang normal. Salah satu metode pendidikan bagi anak tunarungu adalah melalui sistem segregasi, yaitu memberikan pendidikan khusus yang terpisah dari anak tunarungu (Akhmad Akbar et al., 2024). Penerapan sistem segregasi ini terbilang penting bagi difabel tunarungu, mengingat kemampuan mereka dengan manusia normal tidaklah sama. Salah satu wadah pendidikan yang menerapkan sistem segregasi adalah pondok pesantren. Penerapan segregasi biasa terjadi di pesantren tradisional dan modern (Arif Ardiansyah & Muna Erawati, 2024). Dengan sistem segregasi yang dimiliki pondok pesantren, menjadikan pondok pesantren sebagai tempat yang tepat bagi difabel tunarungu untuk menuntaskan kewajiban mereka mempelajari ilmu keagamaan.

Berdasarkan data statistik sekolah luar biasa tahun 2019 jumlah penyandang tunarungu di Indonesia sebanyak 26.438 jiwa dan Jawa Timur sebagai provinsi yang menyumbang 17% penyandang tunarungu dengan angka mencapai 4512 jiwa. Melihat jumlah tunarungu yang cukup besar di regional Jawa Timur, ternyata tidak disertai dengan fasilitas pendidikan agama yang mencukupi. Bisa ditinjau perbandingan dari penyandang disabilitas dengan keberadaan unit pendidikan islam berupa pondok pesantren untuk kaum disabilitas tunarungu terbilang kurang, apalagi untuk regional Jawa Timur yang sama sekali tidak memiliki pondok pesantren khusus difabel tunarungu. Pada regional Pulau Jawa bagian tengah sudah diwakili oleh Pondok Pesantren Darul Ashom Yogyakarta. Sedangkan untuk regional Pulau Jawa bagian barat sudah diwakili oleh Pondok Pesantren Tahfidz Difabel BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta. Meninjau tingginya presentase angka tunarungu di Jawa Timur dan ditambah tidak adanya pondok pesantren tunarungu di Jawa Timur, membuat Provinsi Jawa Timur menjadi fokus utama dan menjadi provinsi yang benar-benar membutuhkan pondok pesantren difabel tunarungu.

Tabel 1. 1 Kabupaten Penyandang Tunarungu Tertinggi di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Tunarungu
Lamongan	247
Sumenep	239
Kediri	204
Jombang	202

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.1, ditemukan bahwa di Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa kabupaten yang memiliki presentasi difabel tunarungu yang tinggi, yakni Kabupaten Lamongan, Sampang, Kediri, dan Jombang. Berdasarkan beberapa kabupaten tersebut bisa dilihat presentase penyandang disabilitas tunarungu hampir sama tingginya, maka perlu titik tengah untuk mengakomodir penyandang tunarungu dari beberapa kabupaten tersebut. Titik tengah antar kabupaten tersebut yang dianggap relevan adalah Kota Surabaya (lihat gambar 1.1). Selain Kota Surabaya sebagai titik tengah antar kabupaten tersebut, pemilihan Kota Surabaya sebagai tempat pondok pesantren tunarungu juga didukung dengan wacana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dikutip dari Jawapos, pada hari Senin, 30 Oktober 2023, bahwa Walikota Surabaya Eri Cahyadi mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya dan membantu pendidikan santri dengan pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya pada 2023 yang tembus hingga 40 miliar rupiah. Satu hal lagi yang menjadi perhatian adalah kepedulian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap difabel tunarungu. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya pondok pesantren khusus penyandang tunarungu di Jakarta, yakni Pondok Pesantren Tahfidz Difabel BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Tabel 1. 2 Jarak Beberapa Kabupaten Sekitar Kota Surabaya

Kabupaten/Kota	Jarak dengan Kota Surabaya
Lamongan	56,3 km
Sumenep	177 km
Kediri	120 km
Jombang	74,7 km

Sumber : Google Maps

Permasalahan lain yang dihadapi dalam perencanaan pondok pesantren ini adalah tentang konsep yang benar-benar bisa ramah untuk kalangan difabel tunarungu, mengingat kemampuan serta kebutuhan ruang pada manusia normal dan difabel tunarungu tidak sama. Arsitektur sebagai bagian perancangan tentu bisa menjawab permasalahan tersebut melalui pendekatan *deaf space*. *Deaf space* adalah sebuah pedoman untuk memandu dan menginspirasi desain lingkungan bagi penyandang tunarungu secara responsif dan ekspresif yang berdasar dari cara hidup mereka yang unik (Bauman, 2010). Penting untuk dicatat bahwa kemampuan utama individu tuli terletak pada jangkauan sensori mata (visual) (Holmes Hlibok & Malzkuhn, 2020). Melihat kunci utama dari individu tuli yang bertumpu pada sensori visual, *deaf space architecture* dianggap sebagai konsep yang tepat. Hal ini disebabkan *deaf space architecture* memiliki beberapa aspek penting untuk mengakomodir kebutuhan difabel tunarungu secara visual. Konsep *deaf space architecture* ini mencakup lima aspek utama, yaitu 1) Ruang dan kedekatan, 2) Jangkauan sensorik, 3) Mobilitas dan kedekatan, 4) Pencahayaan dan warna, dan 5) Akustik. Tujuan dari konsep-konsep ini adalah untuk memperluas kemampuan individu dalam merespons ruang dengan mempertimbangkan keterbatasan penyandang tunarungu yang hanya mampu menjangkau sensori visual sejauh 180 derajat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran ruang penyandang difabel tunarungu menjadi 360 derajat (Bauman, 2010).

Perencanaan desain pondok pesantren di Surabaya dengan konsep *deaf space architecture* dapat menjadi solusi dari beragam permasalahan diatas, dimana

pondok pesantren ini dapat difungsikan demi menunjang fasilitas pembelajaran keagamaan bagi disabilitas tunarungu yang ada di Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan *deaf space architecture* yang bertujuan memfokuskan kenyamanan seluruh pengguna terkhusus bagi difabel tunarungu.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan Pondok Pesantren Difabel Tunarungu ini sebagai berikut:

1. Menciptakan tempat belajar yang nyaman dan mumpuni bagi santri penyandang tunarungu sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam menimba ilmu di pesantren melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan.
2. Memberikan pendidikan agama islam kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan fasilitas yang sesuai dengan keterbatasan mereka.

Sedangkan sasaran dalam perancangan Pondok Pesantren Difabel Tunarungu ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan rancangan pondok pesantren tunarungu yang memiliki fungsi edukasi, terapi, dan pembinaan yang mendukung bagi kenyamanan pengguna.
2. Menerapkan rancangan pondok pesantren tunarungu dengan pendekatan *deaf space* yang dapat mengakomodasi aktivitas di dalamnya.

1.3 Batasan dan Asumsi

Perancangan Tugas Akhir Pondok Pesantren Difabel Tunarungu dengan Pendekatan *Deaf Space Architecture* ini memiliki batasan dan asumsi yang menjadi acuan dalam perancangannya.

Batasan dalam perancangan Pondok Pesantren ini adalah sebagai berikut:

1. Desain pondok pesantren yang memperhatikan konsep *deaf space architecture*.
2. Terdapat gedung asrama dan gedung sekolah untuk santri putra dan santri putri.

3. Pondok Pesantren menerima santri putra baru dan santri putri baru setiap tahunnya dengan rentang usia menginjak bangku Mts/SMP dan MA/SMA yakni pada umur 12-18 tahun.

Asumsi dalam perancangan Pondok Pesantren Difabel Tunarungu ini adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Difabel Tunarungu diasumsikan untuk jenjang MTs.
2. Pondok Pesantren Difabel Tunarungu ini diasumsikan sebagai proyek milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Total kapasitas Pondok Pesantren diasumsikan adalah 300 orang dengan rincian 180 santri, 20 guru, 10 staff, dan sisanya ialah tamu atau wali santri yang berkunjung atau menjenguk anaknya.
- 4.

1.4 Tahapan Perancangan

Gambar 1.3 menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan perancangan tugas akhir ini.



Gambar 1. 1 Skema Tahapan Perancangan

Sumber : Penulis, 2024

Tahapan perancangan dilakukan agar mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai, dalam pengerjaan Pondok Pesantren Difabel ini dimulai dari langkah-langkah berikut :

1. Interpretasi judul

Pondok Pesantren sebagai contoh bangunan yang dapat menampung kegiatan pembelajaran maupun sosial pengguna. Menerapkan pendekatan *Deaf Space Architecture* yang dapat menunjang dan membantu pengguna dalam aspek pendidikan maupun bersosial difabel tunarungu.

2. Mengumpulkan data data

Mengumpulkan data data yang dapat membantu proses perancangan Pondok Pesantren Tunarungu, baik berupa literatur, peraturan, data, dan lain lain, baik dari sumber primer maupun skunder.

3. Menganalisis data

Menganalisis data yang telah didapat terkait Pondok Pesantren baik data primer ataupun data skunder.

4. Mengkaji teori

Mengkaji teori terkait azas dan metode perancangan, literatur, peraturan terkait perancangan Pondok Pesantren.

5. Merumuskan tema dan konsep

Mengintegrasikan gagasan, data, teori, literatur, dan peraturan ke dalam satu benang merah yang bertujuan untuk mendukung proses perancangan agar tetap sesuai dengan jalur perancangan.

1.5 Sistematika Laporan

Rangkaian pembahasan perancangan Pondok Pesantren berbasis *Deaf Space* di Surabaya akan dipaparkan dengan beberapa poin sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB I menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya Pondok Pesantren Difabel Tunarungu di Kota Surabaya, tujuan dan sasaran, serta batasan dan asumsi perancangan.

BAB II Tinjauan Perancangan

BAB II membahas mengenai studi literatur seputar Pondok Pesantren Difabel Tunarungu dan *Deaf Space Architecture* dari buku dan jurnal.

BAB III Tinjauan Lokasi

BAB III fokus membahas mengenai pemilihan lokasi tapak beserta kriterianya.

BAB IV Analisa Perancangan

Pada BAB IV dilakukan analisis terhadap tapak terpilih, analisis organisasi ruang dan bentuk tampilan Pondok Pesantren Difabel Tunatungu.

BAB V Konsep Perancangan

Pada BAB V membahas mengenai pemilihan tema dan konsep yang akan digunakan dalam perancangan Pondok Pesantren Difabel Tunarungu.